

### **BAB III**

## **KOLABORASI PEMERITAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM POSONG DI DESA TLAHAP, KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG**

### **A. Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung**

Objek Wisata Alam Posong dalam pengelolaannya, tidak serta-merta dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atau Pemerintah Desa saja. Namun ada pihak diluar pemerintah yang ikut andil dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong , yaitu pihak swasta dan masyarakat. Pola hubungan kerjasama antara Pemerintah , Swata dan Masyarakat tersebut, sering disebut sebagai inovasi baru dalam ilmu administrasi publik dan sering disebut dengan istilah *Collaborative Governance*.

Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat atau *Collaborative Governance* dapat didefinisikan sebagai paradigma baru dalam proses tata kelola, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti swasta dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah bersama, yang dirasa tidak mudah jika dipecahkan oleh satu organisasi saja. Tidak hanya itu, kolaborasi antara pemerintah , swasta dan masyarakat ini dilakukan melalui musyawarah dan interkasi secara rutin dalam mencapai tujuan bersama dan untuk meningkatkan *public value* dari pada bekerja secara *individual*.

Keterlibatan para pemangku kepentingan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam aktivitas dan intensitasnya tidaklah sama. Hal itu dikarenakan Obyek Wisata Alam Posong dalam pengelolaannya terbagi menjadi dua, yaitu Obyek Wisata Alam Posong bagian bawah atau Posong lama yang sekarang dalam pengelolaannya hanya dikelola oleh Pemerintah Desa dan Taman Wisata Alam Posong atau Posong baru yang dalam pengelolaannya dikelola oleh swasta. Meskipun Dalam Pengelolaannya Obyek Wisata Alam Posong terbagi dua, namun sebenarnya antara Pemerintah Desa dan Swasta telah terjadi kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dilatar belakangi oleh membludaknya pengunjung ke Obyek Wisata Alam Posong lama yang saat itu luasnya hanya 1000m dan dirasa tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung saat itu, begitupun fasilitas yang diberikan juga tidak bisa mengimbangi jumlah pengunjung Obyek Wisata Alam Posong lama saat itu. Hal ini lah yang memberikan ruang bagi pihak diluar pemerintah yaitu swasta, untuk berkontribusi dalam perluasan Obyek Wisata Alam Posong. Pembangunan pemekaran Obyek Wisata Alam Posong ini didirikan secara mandiri oleh pihak swasta pada tanggal 25 Desember 2017, dengan membeli tanah masyarakat setempat seluas 1 Ha, melalui perijinan dari pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten.

Pemekaran Obyek Wisata Alam Posong ini sekarang dikenal dengan nama Taman Wisata Alam Posong yang letaknya diatas Obyek Wisata Alam Posong

yang lama. Akses menuju Taman Wisata Alam Posong juga sama dengan Akses menuju Obyek Wisata Alam Posong lama, dan akses itu merupakan Jalan Untuk Tani (JUT). Begitu pula mengenai loket masuk, bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Taman Wisata Alam Posong secara otomatis juga mengunjungi Obyek Wisata Alam Posong lama. Hal itu dikarenakan loket masuk menuju Taman Wisata Alam Posong harus melalui loket masuk Obyek Wisata Alam Posong yang lama. Walaupun pengujung harus membayar dua kali tiket masuk, namun sudah 3 tahun terakhir ini jumlah pengunjung yang mengunjungi Obyek Wisata Alam Posong yang lama maupun yang baru, mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, dihasilkan data bahwa, sebelum adanya pembangunan Taman Wisata Alam Posong, pendapatan daerah yang di dapat oleh Obyek Wisata Alam Posong yang lama Hanya 300 juta rupiah / tahun dan setelah terjadi pembangunan Taman Wisata Alam Posong, pendapatan yang didapat oleh daerah mencapai 1 milyar rupiah lebih / tahun.

Dengan di bangunnya Taman Wisata Alam Posong, menjadikan wisatawan yang datang berkunjung tidak hanya menikmati keindahan *golden sunrise* saja. Namun selain itu setelah puas menikmati keindahan *golden sunrise*, wisatawan juga dapat menikmati kopi khas posong, yang disajikan langsung oleh masyarakat atau petani kopi Desa Tlahap. Dengan menikmati kopi, para wisatawan juga disuguhkan oleh keindahan gunung raksasa yang seperti menghimpit posong, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Tidak hanya itu para wisatawan yang membawa rombongan keluarga juga disediakan fasilitas

seperti *play ground* anak, sehingga wisatawan anak-anak dapat bermain di area Taman Wisata Alam Posong.

Dari pemaparan fakta diatas, maka terlihat pola hubungan kolaborasi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Hal itu dapat terlihat mulai dari pembangunan Taman Wisata Alam Posong yang harus melalui perijinan dari Pemerintah Desa Tlahap dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pembangunan Taman Wisata Alam Posong oleh pihak swasta, dan partisipasi Masyarakat Desa Tlahap dalam kegiatan pariwisata, yang diekspresikan melalui pelayanan menyuguhkan kopi.

Secara khusus memang belum ada regulasi yang mengatur tentang adanya kolaborasi Antara Pemerintah Kabupaten Temanggung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), Pemerintah Desa Tlahab, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam mengelola Obyek Wisata Alam Posong . Namun dalam prakteknya sudah banyak kegiatan atau program kepariwisataan di Obyek Wisata Alam Posong yang melibatkan pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai proses kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat atau *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong untuk mengetahui bagaimana proses *Collaborative Governance* yang terjadi.

## **B. Proses Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung**

Dari penjelasan diatas, dapat diidentifikasi bahwa dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dalam praktiknya, sudah terjadi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan tentang analisis proses atau tahapan-tahapan kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahap, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Secara konseptual yang menjadi karakteristik utama dari Proses Kolaborasi atau *Collaborative Governance Process* meliputi diaolog secara tatap muka ( *face to face* ), membangun kepercayaan ( *trust building* ), membangun komitmen terhadap proses ( *commitment to the process* ), berbagi pemahaman ( *shared understanding* ) dan kemudian terbentuknya hasil sementara ( *intermediate outcome*). Untuk memahami pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dalam perspektif *Collaborative Governance*, maka perspektif tersebut perlu dijabarkan dan dipahami lebih mendalam agar nanti hasilnya dapat dikembangkan menjadi model yang aplikatif untuk pengelolaan Obyek Wisata Alam. Penjabaran perspektif tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai responden atau informan. Pada bagian ini akan disajikan penjabaran dari hasil penelitan di lapangan, mengenai Kolaborasi Pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong Di Desa Tlahap Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dalam Perspektif *Collaborative Governance Process*.

## **1. Dialog Secara Tatap Muka ( *Face To Face* )**

Dialog secara tatap muka ( *Face To Face* ) antara pemangku kepentingan ( *Stakeholders* ) merupakan hal yang sangat dasar dan penting dalam membangun *Collaborative Governance*. Karena dalam tahap dialog secara tatap muka ( *Face To Face* ) ini, sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan ( *stakeholder* ) untuk mencapai kesepakatan bersama atau konsensus dan mengidentifikasi peluang keuntungan bersama dalam berkolaborasi. Dialog secara tatap muka ( *Face to face* ) ini merupakan wadah atau sarana suatu kepercayaan dalam menyatukan program yang ditetapkan secara bersama antara *stakeholder*.

Dalam penelitian ini, yaitu tentang kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa dalam tahap dialog secara tatap muka ( *face to face* ) yang dilakukan antar pemangku kepentingan berupa FGD ( *Forum Grup Discussion*), terjadinya forum tersebut dapat dijabarkan dan buktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut :

Menurut Agus Fitri Atmoko selaku Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, beliau menuturkan awal terbentuknya Obyek Wisata Alam Posong dan alasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana awal kepada Pemerintah Desa Tlahap untuk membuka lahan posong menjadi obyek wisata alam seperti sekarang adalah berikut ini :

“Karena memang waktu itu kita komitmen pimpinan ingin ada destinasi baru, dan kebetulan nyambung dengan teman-teman dari komunitas di desa waktu itu pecinta alam sih disana ada namanya jogorekso, itu komunitas pencinta alamnya teman-teman Tlahap, itu mereka *basic* nya di

lingkungan sama pendakian melalui jalur yang sekarang merupakan jalur menuju ke posong, mereka menemukan sebuah titik yang bagi mereka menarik, akhirnya kita ngobrol dengan pimpinan waktu itu nyambung, dan sambungkan dengan teman-teman Bapeda segala macam, “ini kira-kira kalau digarap seperti ini menarik”. Akhirnya kita diskusi panjang akhirnya ada keputusan untuk mengucurkan dana, itu kalau tidak salah dari 2009 diskusi pembangunan posong, terus akhirnya dieksekusi kalau ga 2011 ya 2012, dieksekusi dibangun oleh pemda otomatis kan karena itu lahannya lahan punyanya non pemda jadi itu waktu itu kalau ga salah , punyanya bengkok kepala Desa Kwadungan. Saat itu yang ikut serta dalam pembangunan posong dimuali dari DinasBudPar, terus ada lagi Bapeda, Kepala Bapeda juga ikut, lalu mulai mengerucut ke Pemdes di Pemerintah Desa Tlahap ya. Terus kan harus ada pengadaan tanah kan waktu itu dan melibatkan teman-teman sekda bagian pemerintahan umum yang terkait dengan tanah , DPU juga karena butuh perbaikan jalur sepanjang 3,5 Km , bahkan saat itu pak Bupati nya juga ikut yaitu Bapak H Hasyim.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.1 Kunjungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ke Posong pada tahun 2012**



Sumber : Peneliti,2019

Penuturan dari Bapak Agus Fitri Atmoko selaku Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, diperkuat dengan penuturan dari Pihak Pemerintah Desa melalui Bapak Sumarlan selaku Sekretaris Desa, beliau menuturkan bahwa awal pembangunan posong adalah sebagai berikut:

“Nggih pertama itu kita punya namanya pecinta alam namanya Jogorekso, dulu kita bersembilan, ada Mas Yuli, saya, Hariadin dan teman-teman yang lain, itu awalnya adalah pecinta alam dan kemudian kita ketemu dengan pak Beki Priyono orang Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung di tahun 2009. Nah awalnya kita *ngecamp* disana di posong itu , kita pertama melihat galaksi bimasakti dan rasi-rasi bintang terlihat semua, dan kedua kali kita *ngecamp* disana juga *sunrise* muncul di tengah-tengah 7 gunung , yaitu Sumbing , Merapi Ungaran, Andong , dan lain sebagainya. Dan kita *ekspos* ke media, kemudian kita dapat tanggapan dari Dinas Pariwisata Temanggung untuk pengembangan.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.2 Galaxy Bima Sakti dan *Sunrise* dari Posong**



Sumber : <https://bonvoyagejogja.com/> dan Peneliti,2019

Dari penuturan oleh 2 narasumber yang berbeda diatas, terlihat bahwa Awal pembangunan Obyek Wisata Alam Posong merupakan hasil dari Forum diskusi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pihak masyarakat yang tergabung dalam kelompok pecinta Alam Jogorekso, sebagai pihak yang pertama kali menemukan Posong, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menerima usulan dari Kelompok pecinta alam Jogorekso dan meneruskannya ke pimpinan, dan Tentunya Pemerintah Desa Tlahab yang saat itu merupakan partner masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adanya diskusi mengenai awal terbentuknya Posong, berangkat dari kesamaan pandangan antar anggota diskusi saat itu yaitu, dari pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang menginginkan



Obyek Wisata baru dan ketika itu secara bersamaan ada usulan dari Kelompok Pecinta Alam Jogorekso Tlahap mengenai adanya tempat yang menarik untuk dikembangkan, yaitu Posong, dan dari proses diskusi itulah Obyek Wisata Alam Posong terbentuk.

Setelah Obyek Wisata Alam Posong berdiri atau terbangun dan dibuka secara komersil ke publik. Seiring berjalannya waktu, banyak keluhan dari pengunjung bahkan masyarakat sekitar mengenai Obyek Wisata Alam Posong. Adapun bentuk keluhan dari masyarakat sekitar posong , mereka mengeluhkan bahwa Posong sudah cukup terkenal di dunia Pariwisata, namun sangatlah kecil lahannya dan hanya seluas 1000 m dan fasilitas juga kurang memadai. Kemudian karena banyaknya keluhan yang dirasakan oleh pengunjung maupun masyarakat , maka saat itu di tahun 2017, timbulah inisiatif dari pihak swasta meminta ijin untuk perluasan dari Obyek Wisata Alam Posong.

Berikut penuturan dari Bapak H. Hariyanto selaku pemilik Taman Wisata Alam Posong yang baru, mengenai proses diskusi mengenai perijinan perluasan Obyek Wisata Alam Posong dan alasan beliau memperluas Obyek Wisata Alam Posong yang lama:

“ Ini perlu anda ketahui sebelum adanya Taman Wisata Alam Posong, Desa Tlahap itu ada sebuah obyek wisata yang sangat terkenal tapi masih sangat lah kecil untuk lahan yang dikelola oleh desa, itu hanya seukuran 1000 m. Nah ketika tamu yang banyak berkunjung ke Posong dengan a.... yang diandalkan kan *sunrise*, nah saya punya pemikiran, ketika saya meminta ijin untuk perluasan untuk memberi fasilitas kepada tamu yang berkunjung , tidak hanya melihat *sunrise* tetapi setelah itu bisa menikmati suasana posong dengan suasana yang sangat alam. Kebetulan posong itu terletak di kaki gunung sindoro , dengan ketinggian 1800 mdpl, nah itu udaranya sangat sejuk dan banyak yang dapat dinikmati disitu selain posong sendiri, dengan ketinggian itu kita dapat melihat, kalau kearah timur bisa melihat 7 gunung , dan posong itu terletak di tengah-tengah 2

gunung yang besar yaitu Sindoro dan Sumbing. Terus saya minta izin untuk perluasan , saya membuat taman posong itu tahun 2017 pas diresmikan tanggal 25 Desember 2017. Saat itu saya juga dapat *rekomend* dari Bupati juga untuk perluasan Posong itu dan yang atas itu saya kasih nama Taman Wisata Alam Posong. Sebetulnya *basic* saya itu petani, ketika melihat tamu yang berkunjung itu sekian banyak , kok fasilitasnya hanya seperti ini, la saya langsung masuk ke desa minta izin sama desa,, em,..” seandainya saya buat perluasan pengembangan Posong itu apa di perbolehkan? Boleh” . Alhamdulillah tahun demi tahun sudah ada peningkatan, dari pengunjung juga bisa menikmati Posong dengan tidak hanya melihat *sunrise* dan mau nyantai sama keluarga dan saya juga membuka areal *camping*. Bentuk perijinan ke pemdes hanya tersirat aja mas secara lisan. Itu tu ada perluasan lagi tapi dengan catatan, seandainya nanti akses jalan sudah bagus, saya berani spekulasi untuk perluasan lagi , untuk kedepannya saya satukan dengan taman edukasi kopi, saya pengelola kopi juga , sebelah utara sudah saya Tanami kopi. ” (Wawancara, 30 Desember 2019)

**Gambar 3.3 Suasana Obyek Wisata Alam Posong Sebelum Ada Pihak Swasta**



Sumber : <https://www.harianbernas.com/>

Dari penuturan Bapak H. Hariyanto diatas, dapat terlihat bahwa awal pembangunan Taman Wisata Alam Posong, diawali dari proses tatap muka atau dialog secara tatap muka ( face to face ) antara Bapak H. Hariyanto selaku pihak swasta dengan Pemerintah desa. Proses tatap muka tersebut dilakukan untuk mendapat perijinan perluasan Obyek Wisata Alam Posong dari pihak Pemerintah Desa Tlahap. Tidak hanya itu, proses dialog secara tatap muka juga terjadi antara

Bapak H. Hariyanto dengan Bapak H. Hasyim selaku Bupati Kabupaten Temanggung yang saat itu memberikan dukungan kepada Bapak H. Hariyanto untuk memperluas Obyek Wisata Alam Posong.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan, adanya dialog secara tatap muka ( face to face ) ini merupakan suatu hal yang penting, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat menyampaikan aspirasinya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti halnya Obyek Wisata Alam Posong dan Taman Wisata Alam Posong, kedua Obyek Wisata ini merupakan hasil dari adanya proses dialog secara tatap muka antara pemangku kepentingan. Maka dengan begitu tahap awal dari kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah berjalan secara baik.

Obyek Wisata Alam Posong yang berangkat dari :

- a. Aspirasi Kelompok Masyarakat Pecinta Alam Jogorekso dan mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten dan setelah itu melakukan diskusi yang melibatkan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Tlahap dan Pecinta Alam Jogorekso. Awal pemabangan Obyek Wisata Alam Posong juga melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung bagian pemerintahan umum dan Bapak Bupati saat itu yaitu H. Hasyim.
- b. Taman Wisata Alam Posong yang berangkat dari kegelisahan yang dirasakan masyarakat setempat ,yaitu Bapak H. Hariyanto yang saat itu memiliki pemikiran untuk memperluas lahan Obyek Wisata Alam Posong dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa Tlahap.

Setelah melakukan dialog secara tatap muka (*face to face*) antara *stakeholder* dan menghasilkan kesepakatan atau perjanjian, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu membangun kepercayaan diantara *stakeholder* yang terkait. Hal ini dilakukan supaya kesepakatan atau perjanjian di awal akan tetap langgeng dan berjalan dengan adanya kepercayaan diantara *stakeholder*. Tahap membangun kepercayaan ( *trust building* ) ini akan dijabarkan secara terperinci dan mendalam di nomor pembahasan selanjutnya.

## **2. Membangun Kepercayaan ( *Trust Building* )**

Setelah terjadinya kesepakatan di tahap dialog secara tatap muka (*face to face*), maka tahap selanjutnya bukan hanya melakukan negosiasi diantara *stakeholder* , akan tetapi lebih kepada membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan (*stakeholder*). Munculnya kolaborasi diantara pemangku kepentingan atau *collaborative governance*, salah satunya dikarenakan kurangnya kepercayaan diantara *stakeholder*. Salah satu ukuran keberhasilan dari *collaborative governance* yaitu adanya rasa saling percaya diantara stakeholder, dan rasa saling percaya tersebut didasarkan pada hubungan secara professional atau sosial, artinya; adanya keyakinan dari para pemangku kepentingan terhadap informasi-informasi atau usaha-usaha yang dilakukan oleh stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur membangun kepercayaan (*trust building*) ini, merupakan hal sangat penting bagi lembaga-lembaga pemerintahan. Karena dalam unsur ini diharuskan untuk yakin bahwa mereka bisa percaya terhadap rekan kerja dalam jaringan

(*stakeholder*) lainnya, yang ada di dalam sebuah pemerintahan dan rekan kerja (*stakeholder*) di luar pemerintahan untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya yang telah disetujui bersama untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Dalam penelitian ini, *trust building* atau membangun kepercayaan yang dilakukan dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa dalam membangun kepercayaan diantara stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dapat terlihat dari penuturan berbagai *stakeholder* sebagai berikut ;

Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Fitri Atmoko sebagai Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berikut ini :

“ Kita sering ada monitoring kesana terus kita juga membantu disegi promosi juga, di beberapa media gitu kita juga masukan, ada lagi pelatihan-pelatihan ditingkat kelembagaan juga kita libatkan, iya sebatas itu lah , sampai ada kalau ada kritik saran segala macam begitu masuk di media sosial kita atau pun di via kritik langsung ketemu dengan tamu segala macam itu mereka kita sampaikan, dan juga laporan kunjunganpun setiap bulan kita ambil mas.., pendapatan segala macam. Jika ada penurunan kita sampaikan lalu kita evaluasi terkait harga segala macam dan pelayanan, sampai kalau ada permasalahan tu juga mereka masih ke kita juga, jadi contoh saat tahun baru sempat ada perselisihan terkait jalur posong, jalur posongkan merupakan jalur warga mas, ada kepentingan petani, ada kepentingan wisata segala macam , akhirnya karena itu awalnya adalah jalur pertanian , nah karena mungkin wisata sudah ramai, di tahun baru berbenturan dengan warga waktu itu bukan panen, waktu itu warga baru mau nanem dan mereka butuh angkutan untuk membawa pupuk dengan *truck-truck* kan , jalan waktu itu masih terbatas, orang bawa *truck* kan kalo parkir seenaknya kadang kita juga macet kan jadinya kan. Akhirnya itu ada sempat penutupan segala macam dari warga yang petani , nah itu juga sempat ramai saat tahun baru ,nah itu jadi koordinasi-koordinasi memecahkan masalah masalah dilapangan kita masih sering dilibatkan .bahkan sampai tahun 2019 ini, mereka ada perencanaan bangun apa , terakhir di bawah dekat sigandul, tu Desa Tlahap juga ingin membangun rest area mini untuk tambahan atraksi rangkaian dari Posong , mereka juga diskusi juga dengan kami, diskusi mengenai perencanaan, jadi tidak egois desa langsung memutuskan engaa.” (*Wawancara, 25 Desember 2019*)

**Gambar 3.4 Laporan Kunjungan Obyek Wisata Alam Posong 2019**

LAPORAN KUNJUNGAN WISATA TEMANGGUNG													Target	Gap		
NO	NAMA WISATA	JAN (1)	FEB (2)	MAR (3)	APR (4)	MEI (5)	JUN (6)	JUL (7)	AGST (8)	SEP (9)	OKT (10)	NOV (11)	DES (12)	Jumlah	Target	Gap
4	POSONG	10662	7029	8374	12050	7842	80024	16479	8774	7282	7446	9015	20	135281		

Sumber : Peneliti,2019

Dari penuturan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, dapat terlihat bahwa pengelolaan Posong, Dinas atau Pemerintah Kabupaten masih sering dilibatkan dan dipercaya untuk memecahkan masalah bersama dan juga membantu dalam hal promosi. Namun berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh pihak Pemerintah Desa bahwa dalam membangun kepercayaan dengan masyarakat pihak Pemerintah Desa melakukan kebijakan seperti yang dikemukakan Oleh Bapak Sumarlan selaku perwakilan Dari Pemerintah Desa Tlahap, sebagai berikut :

“ Dari awal kita pengelola bukan orang-orang pemdes tapi pengelola adalah teman-teman pecinta alam itu, mereka mengelola sampai 2013 . kita membuka kesempatan bagi putra desa utamanya adalah yang pingin mengembangkan wisata diatas , jadi kaya yang sebelah itu taman kan itu pengembang juga, Cuma pengembangnya orang sini, kita masih menutup untuk investor dari luar desa, luar daerah apalagi luar negeri, jadi masih pingin mengembangkan orang-orang sini, putra desa sini , kita bekerja sama ayo kita bangun ekonomi yang ada disini.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

Demikian juga yang dikemukakan oleh H. Hariyanto sebagai pemilik Taman Wisata Alam Posong, sebagai berikut:

“Perlu di ketahui juga saya tu sebetulnya seperti orang dagang juga, tapi ada bentuk seperti wisata saya mengacu kepada aturan desa, kalau dilihat dari masuk Posong nah itu jenengan kena tiket 10 ribu ya, nah itu kan saya ga dapat apa-apa itu mutlak masuk desa yang loket pertama, untuk masuk taman, seperti saya jualan , ketika tamu sampai pintu Posong ga masuk, saya ga dapat uang. Keuntungan yang luar biasa tu ya masuk desa karena mau ke Taman Posong harus melalui pintu yang pertama. Itu saya juga ada

pendekatan dengan BUMDES yang mengkondisikan saat ini , Alhamdulillah bagus untuk kerjasama dari kita , dan desa . tapi dengan catatan , harus orang sini , untuk perdes tidak diperbolehkan investor asing masuk. Ada bentuk kerjasama saya dengan desa yaitu dalam satu tahun saya bisa ngasih kompensasi ke warga, sosial masyarakat tapi tetap saya lewat desa. Ya ga seberapa, pelan-pelan, masalahnya ini baru tahap pemula yaitu sebesar 25 juta dan untuk area parkir saya kasih ke desa juga tapi untuk saat ini yang mengkondisikan parkir belum tertata rapi.” (Wawancara, 30 Desember 2019)

Dari paparan tersebut dapat terlihat bahwa fenomena hubungan yang terjadi antara pemerintah dan swasta dalam membangun kepercayaan bersifat koordinasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang sempat terjadi di Obyek Wisata Alam Posong dan juga ikut andil dalam mempromosikan Obyek Wisata Alam Posong dan menerima laporan kunjungan wisatawan.
- b. Pemerintah Desa mengeluarkan kebijakan mengenai aturan pengembangan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa pengembang harus merupakan masyarakat asli Desa Tlahap, dan itu terbukti bahwa pengembang Taman Wisata Alam Posong adalah Bapak H. Hariyanto yang merupakan masyarakat Desa Tlahap asli. Tidak hanya itu dalam membangun kepercayaan diantara stakeholder dalam pengelolaan Obyek Wisata Taman Posong, ada fenomena yang terjadi yang bersifat transaksional yang melibatkan pemilik Taman Wisata Alam Posong dengan Pemerintah Desa Tlahap, yaitu;
- c. Pemberian bagi hasil dari pihak swasta kepada pihak Pemerintah Desa Tlahap, sebesar 25 juta rupiah dan itu masih dilakukan hingga sekarang.

Proses kolaborasi yang terjadi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, bahwa setiap aktor sudah cukup baik dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong. Dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam membangun kepercayaan adalah sudah adanya koordinasi yang cukup baik diantara stakeholder. Setiap aktor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan porsinya, dan setiap aktor sudah menjalankan perjanjian sesuai kesepakatan di awal. Setelah timbul rasa percaya diantara stakeholder maka langkah berikutnya yang diperlukan dalam mencapai kolaborasi yang baik adalah komitmen yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan, dan unsur tersebut akan di paparkan dan dijabarkan di nomor pembahasan berikutnya.

### **3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to the process*)**

Faktor penentu tingkat keberhasilan dari *collaborative governance* adalah tingkat komitmen dari para pemangku kepentingan. Tidak hanya itu, tingkat komitmen juga merupakan faktor terpenting dalam memperlancar proses kolaborasi. Komitmen juga sering dikaitkan dengan motivasi dari para aktor pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan *collaborative governance*. Akan tetapi, para pemangku kepentingan tidak hanya ingin mengamankan posisi mereka dan kepentingan mereka diabaikan. Namun dalam realitasnya, komitmen merupakan keyakinan jika dengan proses kolaborasi maka akan melahirkan keuntungan untuk masing-masing stakeholder dan keuntungan untuk masyarakat. Komitmen dalam proses kolaborasi memiliki arti mengembangkan keyakinan bahwa, dengan cara berunding merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai



kebijakan yang diinginkan. Tidak hanya itu dalam komitmen juga dibutuhkan prosedur yang jelas, adil, dan transparan

Dalam penelitian ini, proses kolaborasi mengenai komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong yang mengembangkan keyakinan akan terciptanya keuntungan bagi masing-masing stakeholder dan keuntungan untuk masyarakat. Hal tersebut akan tercapai melalui perundingan yang jelas, adil dan transparan, dapat terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Agus Fitri Atmoko selaku Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, sebagai berikut

“Justru malah obyek wisata kita sekarang tidak ada yang dikelola oleh pemerintah, jadi 2009 kita masih punya yang namanya Pikatan Water Park, itu salah satu obyek wisata yang masih dipegang oleh Pemerintah Daerah waktu itu, nah tahun 2009 diserahkan kepada BUMD otomatis swastanya punyanya PEMDA kan, nah semenjak itu kita sudah tidak pegang obyek wisata, tidak ada SDM yang PNS, jadi disitu semua PNS ditarik ke kantor, terus akhirnya itu semua dikelola BUMD dan dikelola oleh karyawan-karyawan BUMD yang sudah direkrut disitukan. Kaya Posong itu merupakan BUMDES mungkin, jadi akhirnya rekrutmen teman-teman dari masyarakat, entah itu ada peraturan baru warga setempat saya kurang tahu, jadi yang jelas diutamakan warga setempat, jadi otomatis karyawannya warga setempat, pedagang segala macam diutamakan warga setempat, ya kita utamakan pemberdayaan masyarakat di lingkup desanya.” (*Wawancara, 25 Desember 2019*)

Dari penuturan diatas, dapat terlihat jika Dinas tidak ikut campur dalam pengelolaan obyek wisata, yang mereka utamakan adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Hal mengenai pemberdayaan masyarakat Desa Tlahap juga di perjelas lagi dengan penuturan dari Sumarlan selaku Sekretaris Desa Tlahap, sebagai berikut:

“Allhamdulillah yang jualan diatas semua orang Tlahap, orang sini semua sehingga ekonomi nanti akan sedikit demi sedikit bisa terangkat , termasuk kita berdayakan teman-teman pemuda itu melalui ojek dari bawah ke atas Posong.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.5 Tukang Ojek Posong**



Sumber : Peneliti,2019

Demikian juga pihak Taman Wisata Alam Posong selaku swasta, mereka juga merekrut pegawai dari masyarakat Desa Tlahap dan pihak swasta juga sangat mentaati perjanjian dengan Pemerintah Desa Tlahap yaitu tentang pengutamaan masyarakat Desa Tlahap, dalam keterlibatan pengelolaan Posong. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Hariyanto pemilik Taman Wisata Alam Posong, berikut ini:

“Semua *crew* yang mengelola taman wisata alam posong merupakan masyarakat asli Desa Tlahap mas, mulai dari yang menjaga loket, sekretaris, bendahara dan tukang kebersihannya merupakan warga pribumi, oiya yang jualan itu juga merupakan warga sini, mereka menyewa kios per tahun ke saya 5juta mas. Pernah ada orang mau nyewa orang dari luar Desa Tlahap, berani ngasih harga 10 juta mas, saya tolak mas , karena prinsip saya supaya warga sini penganggurannya berkurang.” (Wawancara, 30 Desember 2019)

**Gambar 3.6 Crew Taman Wisata Alam Posong**



Sumber : Peneliti,2019

**Gambar 3.7 Kios Jualan Warga di Posong**



Sumber : Peneliti,2019

**Gambar 3.8 Penyewa Kios atau Penjual Makanan di Posong**



Sumber : Peneliti,2019

Penuturan para stakeholder diatas juga diperkuat Oleh penuturan Hanafi sebagai pihak masyarakat, sebagai berikut

“Melalui pokdarwis sekarang konsepnya lebih ke desa wisata mas, desa wisata kan menjual paket mas walaupun didalamnya ada tiket,nanti pola penjualannya adalah kita disitu juga menjual obyek wisata, tapi juga keterlibatan masyarakat secara langsung ada disitu dan ada dampak positif untuk masyarakat dalam segi *financial*. Misalnya gini, yang sering tu ada tamu mau ke Posong dari luar kota yang jauh, jadi untuk mempersiapkan mau mengambil *sunrise* kan mereka ga bisa kalau jauh , terus mereka *booking* buat menginap, nah itu kita masuk disitu dan kalau menginap ada dua opsi , kita punya *camping* atau *homestay* , nah kalau *homestay* kita masukan ke masyarakat-masyarakat Tlahap yang sudah siap dengan satu dua kamar, dan *homestay* itu disini sifatnya *homestay* yang berlandaskan kearifan lokal, harus ada ramah tamah dengan pemilik, nah baru nanti jam 4 itu kami membangunkan mereka untuk siap-siap ke posong, dan wisatawan juga dapat menyewa *guide* dan setiap guide dikenakan biaya 100 ribu untuk mengomandoi 10 orang . Setelah menikmati Posong kami arahkan tamu untuk menikmati wisata edukasi yaitu; pengolahan kopi ke pak Tohar biasanya. Ada juga bentuk kerjasama kami masyarakat dengan Swasta, kami juga ikut menjualkan paket yang disediakan swasta dengan bagi hasil 10% harga paket masuk ke katong kami.” (Wawancara, 28 Desember 2019)

**Gambar 3.9 Homestay Obyek Wisata Alam Posong**



Sumber : Peneliti,2019



Gambar 3.10 Paket *Camping* Taman Wisata Alam Posong



Sumber : Peneliti,2019

Proses kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong dalam hal komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterkan Masyarakat Desa Tlahap dengan cara memberdayakannya, dengan mengikut sertakan mereka dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong. Dalam kerjasama antar *stakeholder* sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan sebagai berikut :

- a. Kejelasan prosedur yang dikemukakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, bahwa mereka tidak ikut campur dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.
- b. Pemerintah Desa Tlahap, mereka sangat memberdayakan masyarakatnya, mulai ada yang jualan, tukang ojek dan penyedia jasa *homestay*.
- c. Pihak Swata dimana semua yang mengelola Taman Wisata Alam Posong merupakan putra-putri asli Desa Tlahap, mulai dari pemilik obyek wisata, sekretaris, bendahara dan semua yang terlibat dalam pengelolaan.

- d. Pihak masyarakat dalam penuturannya juga merasa sangat diuntungkan dalam segi *financial*, karena mereka merasa dilibatkan dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong ini. Mereka, pihak masyarakat ada yang menjadi *guide*, tukang ojek, penjual makanan penyedia *home stay*, petani kopi dan hampir semua elemen masyarakat Desa Tlahap merasakan dampak positif dengan adanya kolaborasi ini.

Jadi dengan prosedur yang jelas ini, maka dalam tahap komitmen menuju proses mengenai pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan akan terhindar dari tumpang tindih kepentingan.

#### **4. Kesepahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Proses selanjutnya yaitu adalah membangun kesepahaman bersama. Dalam *collaborative governance*, para *stakeholder* harus mampu menyamakan pemahamannya atau persepsi mereka dalam rangka mencapai tujuan bersama. Adapun arti dari kesepahaman bersama (*shared understanding*) adalah kesepakatan antar pemangku kepentingan tentang pengetahuan yang relevan atau penyatuan persepsi untuk mengatasi masalah bersama. Para *stakeholder* untuk mencapai tujuan, harus memiliki pandangan pemahaman bersama dalam *process collaborative governance*.

Dalam penelitian ini proses membangun kesepahaman bersama, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, yang pertama dapat terlihat dari penuturan Agus Fitri Atmoko sebagai Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, berikut ini:

“Tahun 2019 ini kebetulan dinas kita dapat anggaran dari pusat untuk pelatihan SDM, terutama di pemandu wisata ya, baik itu wisata alam atau budaya segala macam, kita dapat anggaran dari pusat, posong juga kita ajak terlibat. Tidak hanya Posong hampir beberapa di destinasi di Temanggung kita ikut sertakan, untuk diikuti sertakan untuk pelatihan itu , jadi tahun ini jumlahnya kurang tau Posong berapa orang yang ikut, tapi cukup banyak dari Posong untuk ikut, jadi meningkatkan SDM pemandu di Posong. Tahun depan ada lagi pelatihan pengelolaan destinasi juga ada, jadi kita pelatihan-pelatihan lah kalau dari dinas. Jadi tahun ini kita hanya satu kali , tapi ada beberapa jenis pelatihan, jadi tahun ini ada 7 pelatihan kalau tidak salah, mulai dari pemandu wisata alam , pemandu wisata budaya, ada yang wisata semacam *teampark*, jadi jenis-jenis wisata kita klasifikasikan , kita adakan pelatihan masing-masing sesuai jenis mereka ya. Jadi kalau Posong kan ikutnya wisata alam dia, terus dia diikuti di pas pelatihan wisata alam , bebarengan dengan teman-teman wisata alam lainnya di Temanggung , kita satu disitu dalam pertemuan 3 hari dan kuotanya hanya 40 orang . Kita latih disitu, kita datangkan narasumber. Lalu setelah dilakukan pelatihan , ada beberapa peserta yang memenuhi syarat, kita sertifikasikan jadi ada beberapa peserta yang dapat sertifikasi profesi pemandu wisata,” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.11 Pelatihan Pemandu wisata**



Sumber : Peneliti,2019

Dari penuturan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung diatas, dapat terlihat jika Dinas sudah melakukan usaha dalam hal kesepahaman bersama melalui kepelatihan terhadap masyarakat yang terlibat

dalam dunia kepariwisataan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumarlan selaku Sekretaris Desa Tlahap , sebagai berikut :

“ Sering kita sering , setiap kali kita ada kesempatan buat rapat, musyawarah dengan masyarakat kita sering. Sering menyampaikan bahwa wisata itu di tahun-tahun yang akan datang pasti sangat banyak penikmatnya, terutama edukasi wisata alam itu. Hampir setiap minggu kita bertemu dengan pokdarwis (kelompok sadar wisata). Adapun mengenai pelatihan sudah pernah, itupun diadakan oleh dinas pariwisata, itu ada beberapa anak itu sudah mengikuti kegiatan itu, termasuk itu nanti 2020 kita akan mengadakan kursus bahasa inggris dan untuk 2019 ini kita sudah mengadakan kursus bahasa jawa permadani. Lalu juga dalam perumusan visi misi dilakukan secara diskusi lewat ADART BUMDES, nah melalui ADART itu kita tampung aspirasi masyarakat meh seperti apa , para petaninya, para pengelola wisatanya, para buruhnya para pedagangnya sehingga kita bisa sinkron.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.12 Rapat Desa, Antara Pemdес, Masyarakat dan Pihak Swasta**



Sumber : Peneliti,2019

Menurut dari pihak Desa Tlahab diatas , dalam upaya membangun kesepahaman bersama, maka Pemerintah Desa Tlahap sering mengadakan rapat, musyawarah dengan masyarakat dan pokdarwis. Namun dalam penuturannya Pemerintah Desa juga mengiyakan bahwa ada pelatihan dari Dinas Kebudayaan



dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam membangun kesepahaman bersama. Hal itu juga diperkuat dengan penuturan dari pihak swasta.

Sebagaimana dikemukakan oleh H. Hariyanto sebagai pemilik Taman Wisata Alam Posong, beriku ini:

“Sosialisasi yang jelas dari Desa Tlahab, pernah itu ada 3 bulan sekali dari Dinas Pariwisata, sering ada kunjungan dari dinas untuk evaluasi tentang sesuatu yang kurang untuk Taman Wisata Alam Posong itu sendiri, ada juga pertemuan dari BUMDES dan Direksi Taman Wisata Alam Posong sebulan sekali kadang dua bulan sekali, kita *sharing* evaluasi tentang kekurangan kita, harus kita persembahkan untuk tamu dengan cara seperti apa. Ada juga kemaren dari *crew* sini yang ikut pelatihan dari dinas pariwisata, ada 4 orang, mengenai ekowisata, *tracking*, pemandu wisata alam.” (Wawancara, 30 Desember 2019)

Demikian juga yang dikemukakan oleh Hanafi selaku anggota pokdarwis yang mewakili masyarakat Tlahap, berikut ini :

“Pelatihan guide itu dari dinas mas, itupun baru tahun ini, sama BUMDES juga ada pertemuan yaitu sebulan sekali malam minggu terakhir itu yang terjadwal, kalau yang tidak terjadwal ya satu bulan bisa 4 kali.” (Wawancara, 28 Desember 2019)

**Gambar 3.13 Pelatihan Guide**



Sumber : Peneliti,2019

**Gambar 3.14 Pertemuan Rutin yang dilakukan Oleh Pemdes, Swasta dan Masyarakat**



Sumber : Peneliti,2019

Dapat disimpulkan bahwa *shared understanding* atau kesepahaman bersama dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong sudah berjalan cukup optimal. Hal demikian terlihat dari :

- a. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dan diikuti oleh masyarakat Desa Tlahap, *crew* Taman Wisata Alam Posong mengenai pemandu wisata alam dan pelatihan *guide*. Dengan diadakannya kepelatihan seperti itu menjadikan masyarakat bertambah pengetahuannya dalam bidang kepariwisataaan. Tidak menutup kemungkinan dalam acara kepelatihan itu, akan terjadi transfer ilmu diantara peserta dengan pengisi acara tersebut.
- b. Pemerintah Desa Juga sering mengadakan rapat , musyawarah dengan warga , dan dari forum tersebut maka aspirasi masyarakat dapat tertampung dan dapat segera dilaksanakan.

- c. Pihak swasta yang merupakan masyarakat Desa Tlahap, juga sering mengadakan pertemuan dengan BUMDES yang dilakukan sebulan sekali.
- d. Adapun upaya kesepahaman bersama yang dilakukan oleh Swasta dengan Pemkab Kabupaten Temanggung yaitu adanya kunjungan dari dinas untuk mengevaluasi kekurangan Taman Wisata Alam Posong.

Jadi dari fakta diatas, para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, dalam proses kesepahaman bersamanya ( *shared understanding* ) sudah terbangun dengan baik.

#### **5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)**

Dalam beberapa *studi* kasus menunjukkan bahwa kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil terjadi, ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi *relative konkret*. Meskipun dalam tahap hasil sementara ini dapat memberikan *output* nyata dari hal tersebut, namun dalam tahap ini *collaborative governance* yaitu hasil sementara dianggap hal yang penting untuk membangun suatu momentum yang dapat berakibat kepada keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan hasil yang nyata atau *feedback* untuk proses kolaboratif, mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen antar *stakeholder*.

Dalam penelitian ini, hasil sementara (*intermediate outcomes*) yang didapat Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, dapat terlihat dari penuturan Agus Fitri Atmoko sebagai Staf Seksi SDM dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ,berikut ini:

“Kita bentuk lembaga-lembaga sesuai jenisnya, kita bentukkan , ada Forum Komunikasi Desa Wisata ,itu diskusi tentang pengelola desa wisata, terus kemudian Tlahap juga termasuk desa wisata juga. Terus Forum Komunikasi Pengelola Objek Wisata diantaranya Posong, dia jadi bagianya juga . terus HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu baru mau dibentuk tapi embrio orang-orangnya sudah kita latih dengan anggaran dari pusat tadi. Nah perlu saya jelaskan bahwa disini kami hanya bertugas sebagai *guiding* atau menentukan arah program saja mas” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.15 Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Temanggung**



Sumber : Peneliti,2019

Dari penuturan dari pihak dinas diatas dapat terlihat jika, dalam proses hasil sementara ini mereka sudah membentuk lembaga-lembaga untuk menaungi kelompok-kelompok pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Menurut bapak Agus dalam konteks kolaborasi ini peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung hanyalah sebatas *guiding* dan penentuan arah program. Demikian juga yang dikemukakan oleh Sumarlan sebagai Sekretaris Desa Tlahap berikut :

“Ini kita sedang mengembangkan itu TIC , Tourism Information Center . jadi di sebelah jembatan sigandul, nah kalo jenengan dari bawah sebelah kiri jalan kan ada tu baru dibangun itu. Itu nanti kita pusatkan disana

semua, tempat oleh-oleh, termasuk informasi apapun yang ada di Desa Wisata Tlahap ini. Lalu dengan swasta masuk kan mas, ada pembagian hasil juga mas. Adapun regulasi yang dihasilkan mengenai pengelolaan Posong, SDM harus warga sini dan pihak pengembang juga harus warga sini. Kalau secara pendapatan atau penghasilan Posong luar biasa, bisa dikatan per tahun itu rata rata 1 Milyard itumasuk PAD, yaitu sistemnya 50-50 . 50% pengelola, 50% desa.” (Wawancara, 25 Desember 2019)

**Gambar 3.16 *Tourism Information Center* Desa Tlahap**



Sumber : Peneliti,2019

Demikian juga pihak Swasta. Mereka juga memeperjelas dan memeperkuat penuturan dari pihak Pemerintah Desa Tlahap. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Hariyanto pemilik Taman Wisata Alam Posong, berikut ini:

“Kalau pemasukan sih tetap bertambah, gak dari pengelola sini ga dari masyarakat pemasukan bertambah. Ada juga masyarakat yang tidak punya ladang dulunya nganggur dibukanya adanya warung-warung terus mereka sewa, terus mereka bisa berjualan.pengangguran otomatis berkurang.” (Wawancara, 30 Desember 2019)

Pernyataan dari pihak swasta diatas, di buktikan juga dengan pernyataan dari masyarakat penyewa kios. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiharto selaku penyewa kios, berikut ini:

“Sejak dibukanya Posong ini, terutama Taman Wisata Alam Posong ini , allhamdulillah pendapatan juga naik. Soale pas setelah dibukannya Taman Posong ini mas, tamu yang datang juga bertambah dan otomatis

pendapatan kami sebagai penjual juga bertambah mas. Mengenai berapa pendapatan kami setiap bulan, setiap minggu ya turun naik si mas, namanya juga jualan, rata rata perminggu itu yaaa keuntungan yang bisa saya dapat kira-kira 5 jutaan mas, itu pas sabtu minggu biasanya yang paling ramai. Oiya saya menjual makan makanan mas seperti nasi goreng, mie rebus , aneka kopi dan gorengan.” (Wawancara, 28 Desember 2019)

Dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong ini, bahwa tujuan dari kolaborasi ini adalah adanya keuntungan yang didapat dari para pemangku kepentingan dengan cara memberdayakan SDM asli Desa Tlahap sebagai salah satu *stakeholdernya*. Dari penuturan beberpa narasumber diatas, hasil capaian sementara adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa Tlahab, Swasta dan Masyarakat mengalami kenaikan yang signifikan.
- b. Dibentuknya Forum Komunikasi Desa Wisata, Forum Komunikasi Pengelola Wisata, dan Himpunan Pramuwisata Indonesi (HPI)
- c. Regulasi Desa yang dihasilkan, yaitu mengenai hanya Sumber Daya Manusia asli Desa Tlahap sajalah, yang boleh terlibat dalam pengelolaan obyek wisata alam posong. Tidak hanya itu setelah adanya kolaborasi diantara stakeholder dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, maka hasil fisik yang terbaru adalah akan dibangunnya,
- d. TIC (Tourism Information Center) untuk wisata di Desa Tlahap, khususnya Posong.

Adannya hasil sementara ini diharapkan mampu meningkatkan *efektivitas* kegiatan pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, selain itu juga mampu mengurangi atau meminimalisir masalah teknis yang ada di kawasan Obyek Wisata Alam Posong. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan

Obyek Wisata Alam Posong saat ini juga telah tergabung dalam beberapa forum, seperti Forum Komunikasi Pengelolaan Wisata Alam dan Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kedua forum tersebut terbentuk atau hasil dari keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Parwriwisata Kabupaten Teamanggung dalam konteks pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong.

Dari fakta-fakta diatas maka dapat terlihat bahwa masing-masing stakeholder memiliki tupoksinya atau peranannya sendiri-sendiri. Sehingga untuk hasil sementara proses kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata Alam Posong, sudah berjalan dengan baik untuk mendorong terciptanya siklus , komitmen untuk terciptanya kolaborasi yang lebih baik lagi.